

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat terletak antara $00^{\circ}14'15''$ LU, $00^{\circ}03'30''$ LS dan $99^{\circ}35'00''$ BT s/d $99^{\circ}42'20''$ BT dengan ketinggian 0-10 meter dari permukaan laut, sedangkan secara administrasi Pemerintahan Nagari Sasak berbatasan langsung dengan nagari-nagari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Sebelah Utara dengan Nagari Sungai Aua, Aia Gadang Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia, Sebelah Barat dengan Nagari Sungai Aua dan Sebelah Timur dengan Nagari Lingkung Aua, Kapa, Koto Baru dan Katiagan Mandiingin.¹

Nagari Sasak dilalui oleh dua sungai yaitu: Sungai Batang Kapar dan Sungai Batang Pasaman, disamping itu wilayah ini juga memiliki dua muara, yaitu :Muara Sasak dan Muara Tanjung. Menurut cerita masyarakat secara turun temurun asal usul nama Sasak yaitu daerah ini merupakan tempat (habitat) binatang buas yaitu buaya, yang hidup di dua sungai, Sungai Batang Kapar dan Sungai Batang Pasaman, sebagian besar penduduk disini bertempat tinggal disekitar pinggiran sungai, sehingga dalam hal ini masyarakat harus berupaya untuk mencegah serangan dari buaya, maka dari itu, penduduk berusaha membuat pagar nibung sebagai pembatas pengaman untuk memanfaatkan air sungai sebagai sumber kehidupan. Dalam pembuatan pagar pengaman ini masyarakat

¹ Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Profil Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, 2008-2010, hal. 1.

mengerjakan secara gotong royong dan memanfaatkannya secara bersama-sama, karena keterbatasan wilayah yang dipagar, maka dalam pemanfaatan sungai tersebut terpaksa masyarakat berdesak-desakan, sehingga muncullah istilah Sasak. Dan akhir cerita berdirilah sebuah Nagari Sasak yang dikepalai oleh seorang kepala penghulu adat yang pertama di Nagari ini yang bernama Dt. Sinaro Mangkuto.²

Nagari Sasak terletak di kawasan pantai. Mata pencaharian masyarakat Nagari Sasak dominan nelayan, mereka mengeluti sector laut semenjak Nagari Sasak ini muncul. Selain didominasi mata pencaharian nelayan, mereka juga mengeluti bidang perkebunan dan pertanian, serta perdagangan.

Sebelum diperkenalkannya unit pemerintahan Orde Baru, maka unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat dikenal dengan istilah Nagari. Untuk memudahkan mekanisme dan penyeragaman pemerintahan, maka pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 1979. UU ini menetapkan desa sebagai unit pemerintahan terendah yang berlaku diseluruh kawasan Indonesia.

Untuk kasus Sumatera Barat jorong-jorong yang merupakan bagian integral dari pemerintahan Nagari ditetapkan menjadi pemerintahan desa. Untuk Sumatera Barat pemberlakuan Undang-Undang No 5/1979, tentang pemerintahan desa, bukanlah semata-mata perubahan nama saja tapi juga menyangkut perubahan organisasi pemerintahan. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan bahwa yang diangkat sebagai desa menurut UU No 5/1979 adalah jorong-jorong

²*Ibid*, hal.1.

yang sebelumnya merupakan bagian integral dari Nagari. Sehingga dari 543 Nagari yang ada di Sumatera Barat melahirkan 3.544 desa,³ yang merupakan pemerintahan terendah dibawah camat. Sebelum diterapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, Nagari Sasak terdiri dari tujuh jorong.⁴ Yaitu Padang Halaban, Pondok, Pasa Lamo, Rantau Panjang, Sialang, Pisang Hutan, dan Maligi. Namun setelah diterapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 Nagari Sasak dipecah menjadi tujuh desa. Ketujuh desa tersebut identik dengan jorong yang ada sebelumnya, yaitu Desa Padang Halaban, Pondok, Pasa Lamo, Rantau Panjang, Sialang, Pisang Hutan, dan Maligi.

Setelah Indonesia merdeka, Nagari tetap dipertahankan sebagai wilayah pemerintahan terendah di Indonesia, hal itu berlanjut sampai diberlakukannya UU No 5/1979 oleh pemerintahan Orde Baru. Atas dasar pertimbangan ekonomis guna mendapatkan bantuan desa agar mengalir lebih besar ke daerah Sumatera Barat maka melalui UU itu dijadikanlah jorong setingkat desa.

Apabila secara politis pemerintahan nagari dipimpin oleh seorang wali nagari maka pada masa pemerintahan desa, tiap-tiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Oleh karena itu dalam hal kekuasaan wali nagari sebagai kesatuan administratif menjadi hilang. Sebagai kompensasi dari hilangnya kekuasaan dan fungsi administratif dari wali nagari tersebut, pemerintah membentuk

³MestikaZed dkk. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hal. 260.

⁴*Ibid.* Hal.2.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertugas memelihara kekayaan nagari seperti hutan, tanah, batang air, pasar dan lain sebagainya.⁵

Pada masa pemerintahan desa, sudah jelas mengurangi peranan ninik mamak di Nagari Sasak, karena secara politik pemerintahan desa, dalam melaksanakan roda pemerintahan yang diturunkan dari kecamatan, tanpa bekerja sama dengan ninik mamak. Pada masa pemerintahan nagari yang dipimpin oleh *kapalo* nagari adanya hubungan kerjasama dengan ninik mamak karena pemerintahan nagari itu sendiri terdiri dari unsur-unsur ninik mamak.

Dampak lain dari perubahannagari ke desa adalah berkurangnya rasa kebersamaan masyarakat, karena masa pemerintahan desa masyarakat sudah terkotak-kotak dan masing-masing desa sudah menerima aturan-aturan dari pemerintahan atasan (camat). Majunya hasil dari suatu pembangunan tergantung dari kreatifitas atau tidaknya kepala desa masing-masing. Apabila kepala desanya tidak kreatif maka desanya tidak akan maju dan begitu sebaliknya. Apabila kepala desanya kreatif dan memiliki rasa inovasi yang tinggi maka desanya akan maju.

Pada tahun 1984 pemerintah mendirikan tempat pelelangan ikan yang terletak di Jorong Pasa Lamo. Pada tahun 1990-an juga dibangun puskesmas di Jorong Padang Halaban. Selain itu, renovasi terhadap Sekolah Dasar (SD 01) yang sudah ada pada masa penjajahan Belanda, sehingga sampai saat ini masih

⁵Lembaran Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat tahun 1983. Peraturan Daerah No. 13 tahun 1983. "Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat", hal. 270-272.

melakukan pembangunan baik dalam bidang pendidikan maupun sarana tempat ibadah.⁶

Salah satu permasalahan yang dihadapi sekaligus yang sangat mengkhawatirkan di Nagari Sasak ini adalah abrasi pantai yang telah merusak bangunan-bangunan ataupun fasilitas yang ada disekitar pantai, khususnya jorong pondok. Kondisi bangunan yang terancam adalah sekolah 2 unit, tempat ibadah 6 unit, daerah wisata, jalan desa sepanjang 7 km. Ancaman abrasi ini sejak tahun 1998 hingga tahun 2012, terhitung sekitar 300 unit rumah warga hancur dihantam abrasi di Jorong Pondok. Kondisi ini membuat masyarakat tidak berdaya sehingga perhatian pemerintah lebih fokus untuk perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perhatian tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Sasak khususnya Jorong Pondok dan Jorong PasaLamo.⁷

Setelah desa kembali kenagari terjadi peningkatan ekonomi yaitu pada tahun 2012 Gubernur Provinsi Sumatera Barat memberikan dana sekitar Rp 10milyar untuk membangun grip pemecah ombak di sepanjang pantai Sasak, dana bersumber dari APBD dan APBN. Grip untuk pemecah ombak merupakan solusi untuk mengatasi abrasi pantai karena abrasi ini membahayakan kehidupan masyarakat. Pada tahun 2012 abrasi yang terjadi di Jorong Pondok, tercatat 24 rumah rusak berat, dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,5 milyar, sedangkan rumah yang terancam sekitar 142 unit, rumah-rumah yang rusak dan terancam ini terpaksa di pindahkan ke Jorong Padang Halaban, dengan bantuan

⁶ Pemerintahan Pasaman Barat. *Op.Cit*; hal. 4.

⁷ Vivanews, 14 Februari 2012.

rumah yang diberikan oleh BNPB sebanyak 74 unit dengan nilai Rp. 3.108.000.000,- dan bantuan yang diberikan oleh DKP sebanyak 142 unit dengan nilai Rp. 4.790.000.000,-.⁸

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan ekonomi di bidang pariwisata yang sebelumnya juga telah dikembangkan, terjadinya peningkatan dikarenakan ada tambahan pendapatan masyarakat dengan adanya pariwisata. Misalnya pendapatan pada waktu Lebaran, waktu Lebaran masyarakat Sasak beserta pemerintah Pasaman Barat mengadakan pesta pantai, pesta pantai ini dilakukan selama tujuh hari. Pengunjung pesta pantai ini sangat ramai, tahun 2015 tercatat sebanyak 10.000 orang perhari dengan total 70.000 orang selama tujuh hari, dan ini juga berdampak positif bagi penjual di rumah lapau yang hari biasa cuma menghasilkan Rp 100.000,- perhari, sementara waktu Lebaran rata-rata para penjual di rumah lapau berkisar sebesar Rp 3.000.000,- perhari dengan total Rp. 21.000.000,- selama tujuh hari.

Telah terdapat beberapa studi yang membahas mengenai pelaksanaan UU No 5/1979, misalnya tulisan Sjahmunir, *PemerintahanNagari dan Tanah Ulayat*, (2006).⁹Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan UU No 5/1979 di Sumatera Barat, perubahan pemerintahan desa ke pemerintahan Nagari. Karya lain adalah Imran Manan dalam *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*

⁸Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Profil Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, 2012, hal.

⁹Sjahmunir (dkk). *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press, 2006.

(1995).¹⁰ Buku ini mengungkapkan perkembangan system pemerintahan nagari dari masa pra-kolonial sampai masa pemerintahan Orde Baru.

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini yaitu meskipun Nagari Sasak ini merupakan desa pantai yang seharusnya masyarakatnya bergantung kepada hasil laut atau bermatapencaharian sebagai nelayan, akan tetapi Nagari Sasak ini juga didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat juga bergerak di bidang pertanian, (tanaman pangan, perkebunan). Komoditi jagung merupakan komoditi yang menjadi andalan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dalam bidang pertanian, tercatat sebanyak 7017 ton jagung dihasilkan dari nagari ini dengan tingkat produktifitas sebesar 6,66 ton per hektar.¹¹ Inilah salah satu keunikan dari Nagari Sasak. Selain itu, untuk melihat perubahan yang terjadi setelah desa kembali ke Nagari. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sejarah Nagari Sasak Tahun 1983-2015”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Menurut Taufik Abdullah batasan masalah ada tiga lingkup yang menjadi perhatian antara lain: lingkup spasial, lingkup temporal, dan lingkup keilmuan.

¹⁰Manan, Imran. *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau*. Padang: Pusat Penerbitan IKIP, 1995.

¹¹BPS. *Sasak Ranah Pasisie dalam Angka 2011*. Kabupaten Pasaman Barat: Badan Pusat Statistik, 2012, hal. 6.

Karena sejarah akan berbicara masalah manusia, waktu dan tempat sehingga secara metodologi bisa di pertanggungjawabkan.¹²

Batasan temporal studi ini adalah 1983-2015. Tahun 1983 ditandai dengan diterapkan pemerintahan desa dan dihapusnya pemerintahan nagari. Sementara itu batasan akhir yang diambil yaitu tahun 2015, untuk melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Nagari Sasak selama lebih kurang 30 tahun terkait diterapkan pemerintahan desa hingga kembali ke nagari serta terjadinya peningkatan status menjadi kecamatan.

Batasan spasial kajian ini adalah Nagari Sasak yang sebelum keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1979, terdiri dari tujuh Jorong. Nagari Sasak terletak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat. Nagari ini dipilih sebagai daerah penelitian, karena setelah keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1979 dan pemerintahan desa diterapkan pada tahun 1983 berubah menjadi tujuh desa, dan nagari ini selanjutnya mengalami peningkatan status dari nagari ke kecamatan pada tahun 2004. Otomatis nagari ini berdiri sendiri. Pada masa menjadi kecamatan, Nagari Sasak lebih banyak mengalami perubahan di bidang ekonomi. Maka untuk mempermudah pembahasan tentang Sejarah Nagari Sasak, maka dikemukakan beberapa pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana latar belakang NagariSasak?
2. Bagaimanakah bentuk pemerintahan dari desa hingga menjadi pemerintahan nagari?

¹² Taufik Abdullah.*Sejarah lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1979, hal.10.

3. Bagaimana keadaan social ekonomi masyarakat setelah kembali pemerintahan nagari?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang Nagari sasak. Selain itu, mengungkapkan bentuk pemerintahan dari desa hingga berubah menjadi pemerintahan nagari, serta menganalisa keadaan sosial ekonomi masyarakat setelah kembali ke pemerintahan nagari.

D. Tinjauan Pustaka

Buku yang ditulis Sri Zul Chairiyah dengan judul “Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat”.¹³ Buku ini berisi tentang pemerintahan desa di Minangkabau, sebelum UU No.5 Tahun 1979 dan setelah UU No.5 Tahun 1979 yang dapat membantu penulis mengetahui pemerintahan Desa Sasak setelah diterapkan UU No.5 Tahun 1979, dan struktur pemerintahannya.

Buku lain yang ditulis oleh Sjahmunir dengan judul “Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat”.¹⁴ Buku ini berisi tentang pemerintahan nagari dan desa serta perkembangannya di Sumatera Barat, pemerintahan nagari dan pemerintahan adat yang dapat membantu penulis mengetahui pemerintahan Nagari Sasak.

Skripsi yang ditulis oleh Deswita dengan judul “Perubahan di Desa Pantai: Suatu Kajian Tentang Sejarah Sosial Desa Simpang Carocok Kenagarian Ampang

¹³Sri ZulChairiyah. *Nagari Minangkabaudan Desa di Sumatera Barat; Dampak Penerapan UU No. 5 Tahun 1979*. Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat (KP3SB), 2008.

¹⁴Syahmunir (dkk). *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press, 1993.

Pulau Tarusan 1979-1999”. Pembahasan skripsi ini tentang perubahan yang terjadi di Kenagarian Ampang Pulau Tarusan setelah nagari berubah menjadi desa.¹⁵ Skripsi ini membantu penulis dalam melihat perubahan yang terjadi setelah nagari berubah menjadi desa.

Skripsi ditulis oleh Satria Zeni Fernando dengan judul “ Nagari Harau 2008-2012”, dalam skripsi ini membahas tentang perubahan sosial sebuah nagari yang terjadi pada masa lampau meliputi keadaan nagari sebelum dan sesudah terjadinya otonomi daerah, kehidupan sosial Nagari Harau, Namun penelitian ini lebih menekankan pada keadaan sosial Nagari Harau dari tahun 2008 sampai tahun 2012.¹⁶ Skripsi ini membantu penulis dalam melihat keadaan sosial suatu masyarakat.

Namun ada skripsi yang membahas tentang salah seorang tokoh di Nagari Sasak. Yang ditulis oleh Nofriadi dengan judul “Inyiak Sasak Dan Golkar Dalam Pemilu 1991 Di Pasaman Sebuah Biografi Politik”. Pembahasan Skripsi ini lebih menekankan tentang peranan inyiak sasak di Nagari Sasak khususnya di Pasaman umumnya.¹⁷

Perbedaan skripsi di atas dengan yang akan ditulis adalah pada obyeknya yaitu pemerintahan desa, nagari dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat

¹⁵Deswita. “Perubahan di Desa Pantai: Suatu Kajian Tentang Sejarah Sosial Desa Simpang Carocok Kenagarian Ampang Pulau Tarusan 1979-1999”.*Skripsi*, Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas: Padang, 2001.

¹⁶Satria Zeni Fernando. “Nagari Harau 2008-2012”. *Skripsi*, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas: Padang, 2013.

¹⁷Nofriadi. “Inyiak Sasak dan Golkar dalam Pemilu 1991 di Pasaman Sebuah Biografi Politik”.*Skripsi*, Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas: Padang, 2000.

relevannya ide atau aspek epistemologis seperti model penulisan dan pembahasan atau yang menyangkut cakrawala pengetahuan tentang pemerintahan desa, nagari dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, ada artikel yang berbicara tentang nagari yang ditulis oleh Muchtar Naim, "Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural".¹⁸ Artikel ini berisi tentang masalah nagari dan desa, mencakup di dalamnya tentang peran pemerintah dalam mengelola pembangunan nagari dan desa yang dapat membantu penulis mengetahui peran pemerintah dalam mengelola pembangunan Nagari Sasak.

E. Kerangka Analisis

Penelitian tentang sejarah Nagari Sasak merupakan penelitian mengenai sejarah sosial ekonomi. Sejarah sosial ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktifitas manusia di masa lampau,¹⁹ baik itu kegiatan menghasilkan barang (produksi), aktivitas pendistribusian barang dan kegiatan memakai barang itu sendiri, serta bagaimana dampak sosialnya bagi masyarakat yang terlihat dari pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya.²⁰

Tulisan ini mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Nagari Sasak terkait dengan diterapkannya Undang-undang No. 5 tahun

¹⁸ Muchtar Naim. Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural, dalam Moh. Hasbi, Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat. Padang: Yayasan Genta Budaya, 1990.

¹⁹ Taufik Abdullah, Abdurrachman Surjomihardjo. *Ilmu Sejarah Dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia, 1985, hal 154-183.

²⁰ Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1993, hal 50.

1979 tentang pemerintahan desa, yang mana nagari berubah menjadi desa hingga kembali ke nagari dan terjadinya peningkatan status. Dalam tulisan ini dikaji tentang sejarah Nagari Sasak. Penulisan ini dengan demikian dapat digolongkan kepada bagian dari sejarah sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan.

Menurut Sejarawan Indonesia Sartono Kartodirjo di dalam bukunya bahwa seorang sejarawan Amerika Robert J. bezuscha mengatakan sejarah sosial ekonomi adalah kajian sejarah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dari lapisan yang berbeda dan periode yang berbeda-beda pula yang berhubungan dengan masalah sosial dan ekonomi masa lampau.²¹ Penelitian ini mengkaji tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setelah diterapkan Undang-undang No. 5 tahun 1979. Fokus studi juga diarahkan pada pengukuran perubahan sistem pemerintahan, sosial dan ekonomi.

Penelitian ini akan membahas tentang sosial ekonomi masyarakat di Nagari Sasak, akibat perubahan sistem pemerintahan dari nagari menjadi desa hingga kembali ke nagari. Kelompok atau komunitas yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah nelayan dan petani. Nelayan adalah orang yang melakukan usaha di bidang kelautan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani adalah orang yang melakukan usaha pertanian guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dalam artian luas petani meliputi usaha perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi, dan pemasaran hasil bumi.

²¹ Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 184.

²²Serta dapat dijelaskan dua pembagian petani yaitu Petani Farmer adalah petani modern yang berusaha tani dengan menerapkan teknologi modern serta memiliki jiwa bisnis yang sesuai dengan tuntutan agribisnis. Petani Peasant adalah suatu kelas petani yang merupakan petani kecil, penyewa, dan buruh tani.²³

Ada beberapa tipe desa, yaitu *pertama*, desa persawahan yaitu desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian sawah, baik yang berpengairan teknis, non teknis maupun tadah hujan. *kedua*, tipe desa perladangan yaitu desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian tanah kering (ladang/tegalan) baik ditanami padi maupun palawija, *ketiga* tipe desa peternakan yaitu desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi peternakan, dan *keempat*, tipe desa neayan yaitu desa yang sebagian kehidupan penduduknya bergantung pada potensi laut. Salah satu ukuran yang digunakan untuk membedakan keempat tipe desa tersebut adalah, potensi yang dimilikinya.²⁴

Sementara itu Jefta Leibo mendefinisikan bahwa desa nelayan atau desa pantai adalah pusat dari seluruh kegiatan anggota masyarakat yang menjadikan usaha-usaha dibidang perikanan sebagai sumber kehidupan mereka.²⁵ Dilihat dari potensi Nagari Sasak cukup besar, dan nagari ini terletak di tepi pantai dan

²² Sartono Kartodirjo, *Ibid.* Hal. 50.

²³ Syahyuti. Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Penelitian Agro Ekonomi* vol. 31 No 1, Mei 2013, hal. 16-17.

²⁴ Safari Imam Asy'Ary. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hal.113-114.

²⁵ Jefta Leibo. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hal. 7.

sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian nelayan, serta penghasilan yang mereka dapatkan sangat tergantung pada hasil laut tersebut, maka Nagari Sasak dapat dikatakan sebagai suatu desa pantai atau desa nelayan. Selain itu Nagari Sasak juga dapat pula digolongkan sebagai salah satu tipe desa perladangan karena sebagian penduduknya juga bergantung pada potensi perladangan seperti sawit serta palawija.

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian ilmu sejarah. Menurut Kenneth D. Bailey, metode adalah teknik riset atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data.²⁶ Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menguji kebenaran rekaman peninggalan masa lalu dan *menganalisis* secara kritis. Metode sejarah terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.²⁷

Tahap pertama, heuristik mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan tema atau topik. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan studi pustaka, yaitu sumber-sumber yang menerangkan tentang keberadaan letak geografis suatu wilayah yang menjadi tempat aktivitas manusia dan kondisi sosial politik dimasa lalu. Melakukan studi ke daerah kabupaten/kota, kecamatan dan nagari sehingga lebih mendapatkan

²⁶ Kenneth D Mengutip dari Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994, hal. 4.

²⁷ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah terjemahan Nugroho Notosusanto*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975, hal. 32-34.

secara administrasi wilayah berdasarkan sejarah. Sumber dalam metode sejarah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang langsung mendekati objek penelitian seperti arsip yang dapat diperoleh dari Kantor Wali Nagari, arsip pribadi, BPS, koran-koran yang bersangkutan langsung dengan Nagari Sasak. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang memperkuat atau mendukung sumber primer yaitu seperti buku-buku, makalah, dan skripsi.²⁸ Melakukan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat yang terlibat dengan topik permasalahan, kita dapat mewawancarai perangkat nagari, mantan kepala desa, nelayan, petani khususnya masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Tahapan kedua adalah kritik sumber baik kritik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otentisitas sumber atau keaslian sumber.²⁹

Tahap ketiga adalah interpretasi (sintesis) berupa penafsiran-penafsiran yang merujuk pada fakta-fakta yang dihasilkan atau merangkai satu fakta ke fakta lainnya sehingga terjalin suatu kesatuan pengertian yang utuh.

Dilanjutkan dengan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah yaitu penulisan atau historiografi. Pada tahap ini fakta-fakta ditemukan akan

²⁸ Louis Gottschalk, *Op. Cit.* Hal. 35.

²⁹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995, hal. 99.

dideskripsikan dalam bentuk penulisan yang sistematis. Sehingga pembaca dapat mengerti tentang sejarah Nagari Sasak setelah menjadi pemerintah desa hingga kembali ke pemerintah nagari.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan tentang permasalahan yang dirumuskan secara kronologis :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II disajikan mengenai gambaran umum Nagari Sasak yang mencakup letak dan keadaan geografis, mata pencaharian penduduk dan perekonomian, tingkat pendidikan masyarakat, serta sistem sosial dan budaya masyarakat.

Bab III membahas tentang perubahan Nagari Sasak sebelum dan setelah diterapkan Undang-Undang tentang pemerintahan desa hingga kembali ke pemerintahan nagari yang mencakup di dalamnya pemerintahan Nagari Sasak sebelum dan pada masa Orde Baru, pemerintahan Nagari Sasak setelah diterapkan UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, pemerintahan Nagari Sasak setelah kembali ke pemerintahan nagari.

Bab IV menjelaskan tentang sosial ekonomi masyarakat setelah kembali ke pemerintahan nagari yang mencakup ekonomi dan pariwisata.

Bab V adalah kesimpulan dari semua permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan jawaban atas pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan.

